



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Komp. Perkantoran Bumi Sara'ea Jln. Wakaaka No.... Telp/Fax
BURANGA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA
Nomor : 03 / 2020

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ PAUD KULAHI”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

Membaca : Surat Permohonan Perpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD KULAHI** a.n **MISNA** Selaku Pengelola Nomor 2019, Tanggal 28 November 2019.

Menimbang : a. Bahwa Untuk Kelancaran Pelaksanaan Penyelenggaraan “**PAUD KULAHI**” yang terletak di **Desa. Jampaka, Kec. Kulisusu , Kab. Buton Utara**, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD);
b. Bahwa Izin operasional Dapat Diberikan Dalam Batas Ketentuan Hukum Dan Peratuan Yang Berlaku.
c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pada Huruf A Dan B Di Atas, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Non Formal Dan Informal;
10. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Buton Utara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada saudara **MISNA** Selaku Pengelola **PAUD KULAH** yang berkedudukan di **Desa. Jampaka, Kec. Kulisusu , Kab. Buton Utara**
- Kedua : Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan belajar tersebut diperpanjang terhitung mulai tanggal 03 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut hingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - b. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan ditentukan kemudian.
 - c. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya -30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buranga
Pada tanggal : 03 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan

Drs.H.LA HID

NIP. 19641231 199412 1 028

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (Sebagai Laporan)
2. DPRD Buton Utara Di Buranga (Untuk Diketahui)
3. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Direktur Jendral Paud-Dikmas Di Jakarta;
6. Kepala PB PAUD dan DIKMAS Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Pengawas PLS Di Wilayah Kabupaten Buton Utara;
8. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan;
9. Arsip